

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025, dengan Visi: Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, yang ditandai dengan terwujudnya bangsa Indonesia yang memiliki daya saing yang tinggi. Sejalan dengan visi tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2015-2019 diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Dalam rangka mendukung RPJMN periode ketiga dan pencapaian prioritas nasional sebagaimana telah ditetapkan dalam visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih, diperlukan perencanaan dan evaluasi yang tepat berdasarkan data dan informasi statistik yang berkualitas.

Sementara RPJMD DKI Jakarta tahun 2013-2017 diarahkan untuk peningkatan pembangunan kota Jakarta yang sejahtera, produktif, berkelanjutan dan berdaya saing global dengan fokus utama meningkatkan ketersediaan dan kapasitas sarana dan prasarana wilayah, perekonomian yang kuat dan berkualitas, serta ketahanan sosial dan budaya didukung oleh kapasitas pemerintahan yang baik serta daya inovasi dan kreasi dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan dan sumber daya alam.

Perencanaan merupakan titik awal untuk menentukan arah strategis kebijakan melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Data dan informasi yang andal dan dapat dipercaya akan menjadi acuan yang berguna bagi semua pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan, monitoring, dan evaluasi program dalam rangka mencapai rencana yang efektif dan efisien. Selain itu, dengan adanya rencana strategis yang jelas, relevan, dan terukur yang di dalamnya terdapat titik krusial berupa penentuan outcome dan output pada level strategis. Hal ini merupakan langkah awal yang menentukan keberhasilan performance based budgeting.

### **1.1 Kondisi Umum**

Data dan informasi statistik yang dihasilkan BPS Provinsi DKI Jakarta menjadi sumber informasi pembangunan yang dapat dipercaya, sebagaimana telah digunakan para pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi terhadap perkembangan RPJMD 2013-2017. Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta mencapai 5,95 % pada tahun 2014, sedikit melambat dibandingkan dengan pertumbuhan

ekonomi tahun 2010 sebesar 6,50 %. Adapun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DKI Jakarta atas dasar harga berlaku tahun 2014 mencapai Rp 1.761,4 triliun, dengan pendapatan per kapita sebesar USD 14.730. Inflasi pada tahun 2015 mencapai 8,95 %. Selain indikator ekonomi yang membaik, indikator kesejahteraan rakyat juga mengalami perbaikan, seperti *Human Development Index* (HDI) meningkat dari 0,776 pada tahun 2010 menjadi 0,786 pada tahun 2014. Tingkat kemiskinan mengalami sedikit peningkatan dari 3,48 % di tahun 2010, menjadi 3,92 % pada tahun 2014. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan dari 11,05 % pada Agustus 2010, menjadi 8,47 % pada Agustus 2014. Dengan kondisi yang demikian, berarti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi mengalami perbaikan. Pencapaian RPJMD 2013 – 2017 di atas merupakan modal berharga bagi upaya perbaikan dan peningkatan daya saing DKI Jakarta pada periode berikutnya.

Pembangunan Indonesia dalam RPJMN periode ketiga 2015-2019 diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam, sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Dalam rangka mendukung pencapaian prioritas nasional sebagaimana telah ditetapkan dalam visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang dijabarkan dalam RPJMN periode ketiga diperlukan perencanaan dan evaluasi yang tepat berdasarkan data dan informasi statistik yang berkualitas.

Penyediaan data dan informasi statistik berkualitas yang dihasilkan BPS sangat dibutuhkan baik oleh pemerintah untuk pengambilan keputusan yang efektif dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan. Selain pemerintah, data BPS juga dibutuhkan oleh sektor swasta untuk mendapatkan gambaran yang akurat tentang lingkungan makro guna perencanaan bisnis. Demikian pula dengan lembaga internasional yang menggunakan data BPS untuk memperoleh gambaran kondisi ekonomi dan sosial yang akurat di Indonesia. Sebagai pelaksana statistik dasar dan dalam rangka melaksanakan amanat UU No 16 Tahun 1997, BPS telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional (SSN). Tujuan diterbitkannya SK Kepala BPS tersebut antara lain:

1. Agar para penyelenggara kegiatan statistik memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal;
2. Menghindari kemungkinan terjadinya duplikasi kegiatan oleh para penyelenggara statistik; dan
3. Agar tercipta suatu Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien.

Salah satu upaya BPS Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan SSN antara lain melakukan koordinasi dan kerjasama dengan BPS Pusat maupun pemerintah daerah. Selama periode Renstrada 2010-2014 berbagai kegiatan kerja sama dan hubungan kelembagaan telah dilaksanakan diantaranya penandatanganan MoU baik dengan instansi pemerintah daerah yaitu Bappeda Provinsi DKI Jakarta, keikutsertaan BPS dalam acara yang diselenggarakan oleh pemerintah dan diselenggarakannya sosialisasi berbagai kegiatan statistik.

Selain upaya mewujudkan SSN, BPS Provinsi DKI Jakarta juga memperhatikan tuntutan masyarakat akan data dan informasi yang tepat waktu, lebih rinci, beragam, dan mudah dipahami dilaksanakan oleh BPS Provinsi DKI Jakarta selama periode Renstrada 2010-2014 melalui Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik. Ragam data dan indikator sosial ekonomi yang dihasilkan, antara lain:

1. Data kependudukan hasil Sensus Penduduk (SP) tahun 2010, angka kemiskinan, angka pengangguran, dan berbagai survei rutin di bidang sosial, antara lain Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia, Penyusunan Indeks Perilaku Anti Korupsi, Penyusunan Statistik Modal Sosial, dan Studi Pengukuran Tingkat Kebahagiaan.
2. Data pertanian hasil Sensus Pertanian (ST) tahun 2013, Data Produksi Padi dan Palawija, Data Perusahaan Peternakan dan Rumah Potong Hewan.
3. Angka inflasi, PDRB triwulanan dan tahunan, ekspor dan impor, Industri Besar/Sedang, Hasil Survei Biaya Hidup (SBH), dan berbagai survei rutin di bidang ekonomi yang dihasilkan secara reguler maupun dalam waktu tertentu, antara lain Survei Industri Mikro dan Kecil Triwulanan, Survei Tanaman Pangan/Ubihan, Survei Hortikultura dan Indikator Pertanian, Survei Statistik Harga Perdagangan Besar, Studi Penyusunan Stok Kapital, Survei di bidang Jasa Pariwisata, Survei Tendensi Bisnis, dan Survei Tendensi Konsumen.
4. Selain itu, BPS Provinsi DKI Jakarta juga menghasilkan publikasi Indeks Potensi Kerawanan Sosial (IPKS) 2013, 2014, RW Kumuh, dan Kebutuhan Hidup Cukup (KHC) 2014 dimana pendanaan kegiatan bersumber dari Hibah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 dan 2014.

Dalam hal diseminasi data, pengembangan aplikasi *e-government* untuk kepentingan pengguna data BPS Provinsi DKI Jakarta memberikan kemudahan pelayanan data statistik kepada publik, seperti:

1. Sistem Informasi Pelayanan Statistik (Silastik) selama tahun 2014, Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Provinsi DKI Jakarta telah melayani 236 layanan permintaan data dari pengguna data.

2. *Website* BPS Provinsi DKI Jakarta, Jumlah kunjungan *Website* BPS Provinsi DKI Jakarta terus mengalami peningkatan, hingga Desember 2014 tercatat 88.428 pengunjung ke *Website* BPS Provinsi DKI Jakarta.
3. Sistem katalog mikrodاتا Sistem katalog mikrodاتا merupakan kumpulan mikrodاتا di BPS dan informasinya (metadاتا) yang dikelompokan ke dalam koleksi Statistik Sosial dan Ekonomi untuk pengembangan diseminasi data statistik BPS.
4. Penyempurnaan dan Pengembangan Kemasan Statistik Elektronik dan *Website*.
5. Pelayanan Statistik Terpadu di kantor BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota se-DKI Jakarta.

Dalam mendukung terciptanya *good governance and clean government* dilakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran guna mencegah pemborosan sumber daya. Upaya yang dilakukan BPS Provinsi DKI Jakarta telah menghasilkan capaian, diantaranya:

1. Mendukung BPS dalam pencapaian Opini laporan keuangan oleh BPK dengan predikat Wajar Tanpa pengecualian (WTP) selama 3 tahun berturut-turut
2. Mendukung BPS dalam Peningkatan penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BPS oleh KemenPAN dan RB dari 65,20 di tahun 2013 menjadi 70,05 di tahun 2014, dengan Tingkat Akuntabilitas Kinerja B.
3. Mendapat penghargaan Peringkat I Penilaian Pengelolaan dan rekonsiliasi BMN oleh Kanwil DJKN Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2012.
4. Mendapat penghargaan Peringkat VI Penilaian Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W oleh Kanwil DJPB Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2012

## **1.2. Potensi dan Permasalahan**

### **1.2.1. Potensi**

Dalam melaksanakan tugas, BPS telah memiliki perangkat kelembagaan yang menjamin kemandirian dan independensi BPS sebagai instansi vertikal dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik, antara lain:

1. Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;

4. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik; dan
5. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 116 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 643).

Undang-Undang No. 16 tahun 1997 tentang Statistik merupakan payung hukum bagi BPS untuk menyelenggarakan kegiatan statistik yang diatur lebih lanjut dalam PP No. 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. Sesuai dengan undang-undang tersebut, BPS menjadi lembaga yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar. BPS juga menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Secara kelembagaan, BPS Provinsi DKI Jakarta dan BPS Kabupaten/Kota se-DKI Jakarta sebagai instansi vertikal merupakan bagian integral dari BPS Republik Indonesia secara keseluruhan, dituangkan melalui Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2007. Perpres tersebut menjamin koordinasi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, terutama untuk menyediakan dan memberikan pelayanan data dan informasi statistik dasar baik di pusat maupun di daerah.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah (Pusat), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, menempatkan BPS pada posisi strategis dalam mengembangkan Sistem Statistik Nasional (SSN). BPS menjadi lembaga (*National Statistics Office/NSO*) yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar, serta menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk itu, BPS mengeluarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah yaitu dengan menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).

Di dalam melakukan kegiatan statistik, sebagaimana halnya *National Statistics Offices* (NSO) lain, BPS selalu berpedoman kepada *Fundamental Principles of Official Statistics*, yang ditetapkan oleh UNSTAT. Salah satu contoh penerapan prinsip ini adalah BPS senantiasa mengacu kepada standar

internasional di dalam menerapkan klasifikasi, metode dan konsep statistik. Demikian pula, BPS telah melakukan banyak kerjasama internasional (*international cooperations*) baik bilateral maupun multilateral di bidang statistik dalam berkontribusi untuk perbaikan sistem official statistics di semua negara. Kemampuan BPS di dalam mengembangkan statistik sosial dan ekonomi serta penyusunan berbagai indikator lainnya telah diakui secara luas oleh kantor statistik dari negara lain maupun oleh lembaga-lembaga internasional.

Peningkatan daya saing ekonomi sejalan dengan terbentuknya MEA pada akhir 2015, berdampak pada peningkatan kebutuhan data statistik yang terpercaya dalam merumuskan kebijakan baik oleh pemerintah maupun swasta.

Pada bagian lain, Indonesia juga menjadi anggota *Open Working Group (OWG) on Sustainable Development Goals (SDGs)*. Oleh karena itu, isu dalam OWG dimasukkan pada rancangan teknokratis RPJMN 2015-2019 pada lingkungan strategis sisi global yaitu adanya rencana perubahan iklim dan Agenda Pembangunan Pasca 2015. Penyusunan Agenda Pasca 2015 dilakukan melalui rangkaian OWG, sebagai kelanjutan dari KTT Bumi di Rio+20 tahun 2012 yang menghasilkan kesepakatan prinsip penjabaran konkrit pelaksanaan SDG untuk masuk dalam Agenda Pasca 2015.

SDG's menjadi pendorong bagi penyelenggara maupun pemerhati statistik untuk lebih meningkatkan peran sertanya dalam menilai pencapaian kinerja pembangunan di Indonesia. BPS memiliki peran yang sangat menentukan di dalam mendukung pencapaian target sejumlah indikator kinerja yang merefleksikan SDG's. BPS merupakan lembaga yang mendapat mandat untuk dapat menyediakan data statistik tentang pencapaian Indonesia di sejumlah area fokus SDG's, seperti misalnya pengentasan kemiskinan (*poverty eradication*); pertanian, ketahanan pangan dan nutrisi yang berkelanjutan (*sustainable agriculture, food security and nutrition*); kesehatan; pendidikan; air dan sanitasi; energi; pertumbuhan ekonomi, lowongan kerja dan infrastruktur. Jelaslah, dalam konteks perencanaan strategis periode 2015-2019, BPS harus dapat menjawab kebutuhan pemenuhan data dan informasi indikator SDG's tersebut.

### **1.2.2. Permasalahan**

BPS Provinsi DKI Jakarta telah mengidentifikasi sejumlah permasalahan yang perlu diatasi dalam periode restrukturisasi 2015 – 2019, baik itu permasalahan internal (kelemahan yang bersumber dari dalam organisasi BPS)

maupun permasalahan eksternal (ancaman). Kendala maupun permasalahan BPS Provinsi DKI Jakarta harus mendapatkan respon yang tepat, sehingga citra BPS dari sudut pandang responden sebagai pelopor data statistik terpercaya bagi semua terus meningkat.

Peningkatan kebutuhan pengguna terhadap peningkatan kualitas data dan informasi statistik semakin meningkat. Pengguna data menginginkan agar data dapat tersedia lebih cepat (*faster*), dapat diperoleh lebih mudah (*easier*), lebih berkualitas (*better*) dan lebih murah (*cheaper*). Oleh karena itu, dibutuhkan komunikasi untuk dapat menampung kebutuhan pengguna data yang semakin beragam. Saat ini, belum terbentuk suatu strategi komunikasi yang koheren kepada pengguna data sangat dibutuhkan untuk mendiseminasikan data statistik yang lebih berkualitas.

*Respondent burden* atau keengganan responden untuk berpartisipasi secara mendalam pada sensus/survei yang dilakukan oleh BPS Provinsi DKI Jakarta merupakan suatu permasalahan yang perlu penanganan yang bersifat holistik, mengingat kegiatan statistik yang dilakukan BPS adalah statistik yang bersifat pengakuan, dan bukan pengukuran. Keakuratan pengakuan dari sumber data menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin kualitas data statistik. BPS Provinsi DKI Jakarta dapat mengatasi hal ini melalui upaya peningkatan hubungan dan komunikasi dengan para responden baik responden rumah tangga maupun pelaku usaha di sejumlah sektor industri agar informasi yang disampaikan responden dapat tersampaikan dengan akurat serta sesuai dengan fakta yang responden ketahui.

Kebutuhan terhadap jenis data dan informasi statistik wilayah kecil (*small area statistic*) termasuk data mikro hingga saat ini belum dapat terpenuhi. Di samping itu, Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik tidak memperkenankan BPS menyajikan data individu, sehingga belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan masyarakat.

Peningkatan kebutuhan data yang diperlukan kementerian dan lembaga berdampak pada meningkatnya jumlah aktivitas survei sektoral dan *ad hoc* yang diselenggarakan. Dengan meningkatnya jumlah kegiatan statistik sektoral dan kegiatan survei yang bersifat *ad hoc* yang seringkali terdapat beberapa kegiatan yang pelaksanaannya berlangsung pada saat yang sama tidak sebanding dengan ketersediaan SDM statistik yang profesional. Keterbatasan jumlah petugas statistik khususnya di tingkat kabupaten/kota dan

kecamatan menyebabkan tidak dapat terpenuhinya kebutuhan data yang diperlukan.

Ketepatan waktu rilis (*timeliness*) yang masih belum optimal merupakan permasalahan lain yang teridentifikasi. Permasalahan ini berkaitan erat dengan proses pengumpulan, pengolahan dan analisis hasil statistik yang sering terkendala, sebagai akibat adanya tumpang tindih pelaksanaan survei baik dari sisi waktu maupun dari sisi konten. Kekurangtepatan waktu rilis juga dikarenakan koordinasi antar pusat-pusat dan pusat-daerah yang masih lemah, yang mana hal ini terjadi karena kurang terintegrasinya komunikasi antara pusat dan daerah.

BPS Provinsi DKI Jakarta telah memiliki sistem dan infrastruktur Teknologi Informasi (TI) yang memadai untuk mendukung operasional. Namun masih ditemui adanya aplikasi sistem pengolahan data yang dikembangkan secara *stand alone* (berdiri sendiri) oleh beberapa *subject matter* di BPS RI, sehingga sistem aplikasi yang digunakan untuk pengolahan data hasil kegiatan lapangan di BPS Provinsi maupun Kabupaten/Kota di DKI Jakarta belum sepenuhnya terintegrasi dengan baik.

Dalam pelaksanaan survei atau sensus yang dilakukan BPS Provinsi DKI Jakarta faktor sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap kualitas data yang dihasilkan. Saat ini sejumlah kelemahan pada aspek sumber daya manusia di BPS Provinsi DKI Jakarta telah teridentifikasi. Permasalahan yang ada antara lain, kegigihan petugas dalam menggali jawaban responden masih belum maksimal dan juga kejenuhan petugas karena berulang kali mewawancarai hal yang sama mengakibatkan beberapa pertanyaan mungkin terlewat atau tidak ditanyakan kepada responden. Permasalahan lain dalam rumpun SDM adalah BPS masih belum memiliki system perencanaan karir, analisis jabatan, sistem mutasi, dan standar kompetensi yang dapat menunjang kegiatan dan pelaksanaan manajemen sumber daya manusia.



## **BAB 2**

### **VISI, MISI, DAN TUJUAN BPS PROVINSI DKI JAKARTA**

#### **2.1. Visi BPS Provinsi DKI Jakarta**

Dalam mendukung Visi Pembangunan Indonesia 2005-2025 yaitu “Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur” dan visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, BPS berupaya meningkatkan kontribusinya dalam hal pembangunan nasional di bidang statistik.

Pembangunan nasional di bidang statistik diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang, seperti 1. Reformasi yang mendukung keterbukaan informasi, otonomi daerah yang mengandung tantangan keragaman data dan informasi statistik pada tingkatan wilayah kecil; 2. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mengarah kepada peningkatan kemudahan akses masyarakat terhadap data dan informasi; dan 3. Kesiapan SDM penyelenggara statistik dalam penyediaan data yang berkualitas. Upaya BPS untuk meningkatkan penyediaan data yang berkualitas sejalan dengan Misi Pembangunan Nasional 2005-2025 yaitu “Mewujudkan bangsa yang berdaya saing” sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Dengan memperhatikan misi pembangunan nasional, pencapaian BPS pada Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode kedua 2010-2014, dan Renstra BPS Tahun 2015-2019, BPS Provinsi DKI Jakarta menetapkan visi tahun 2015-2019:

**“Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua”**

**“*The Agent of Trustworthy Statistical Data for All*”**

Kata “pelopor” mempunyai makna bahwa BPS sebagai pencetus ide penyedia statistik terpercaya, sekaligus sebagai pelaku dalam penyediaan statistik terpercaya. Kata “data statistik yang terpercaya” yaitu statistik yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Kata “untuk semua” dimaksudkan bahwa semua pihak mempunyai hak yang sama untuk mengakses data BPS (*impartial*).

Dengan visi tersebut eksistensi BPS Provinsi DKI Jakarta sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena dapat dipercaya semua

pihak. BPS Provinsi DKI Jakarta bukan hanya bagian dari pemerintah, tapi juga bagian dari keseluruhan masyarakat dan aspek kehidupan. Di samping itu, visi ini juga memberikan ruang yang cukup bagi peran serta berbagai pihak untuk ikut serta dalam menyediakan, memanfaatkan, dan menggunakan data dan informasi statistik.

## 2.2. Misi BPS Provinsi DKI Jakarta

Misi BPS Provinsi DKI Jakarta sesuai misi BPS 2015-2019 dengan memperhatikan tugas, fungsi, dan kewenangan BPS. Perumusan misi BPS juga dilakukan dengan memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders), dan memberikan peluang untuk dapat disesuaikan dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis.

Rumusan misi dimaksudkan untuk mampu: (a) mencakup semua pesan yang terdapat dalam visi, (b) memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai, (c) memberikan petunjuk kelompok sasaran mana termasuk instansi pemerintah yang akan dilayani oleh, dan (d) memperhitungkan berbagai masukan dari para pemangku kepentingan.

Pernyataan misi BPS Provinsi DKI Jakarta yang dikaitkan dengan Visi BPS Provinsi DKI Jakarta dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel. 2-1 Pernyataan Visi dan Misi BPS Provinsi DKI Jakarta 2015-2019**

<b>Visi BPS Provinsi DKI Jakarta 2015-2019</b>	Pelopor data statistik terpercaya untuk semua	<b>Misi BPS Provinsi DKI Jakarta 2015-2019</b>
		1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional
		2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional (SSN) yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik
		3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan

Misi BPS Provinsi DKI Jakarta 2015-2019 mengandung arti:

1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional;

**Menyediakan data statistik ...**

“Badan Pusat Statistik merupakan penyelenggara statistik dasar, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat (Perpres No.86 tahun 2007)”.

**... berkualitas ...**

“Berkualitas berarti data statistik yang dihasilkan BPS memenuhi dimensi kualitas yakni relevan, akurat, disajikan tepat waktu, koheren, dapat diakses, dan dapat diinterpretasikan”.

**... melalui kegiatan statistik yang terintegrasi ...**

“Kata terintegrasi bermakna bahwa penyelenggaraan kegiatan statistik perlu lebih mengedepankan pendekatan fungsional, serta mengurangi pelaksanaan yang bersifat terkotak-kotak (*silo thinking*). Pendekatan fungsional berarti alur proses dari pengumpulan data, pengolahan data hingga diseminasi data dilakukan secara terintegrasi antar subject matter .

Terintegrasi juga berarti penyelenggaraan statistik yang dilakukan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat harus saling mengisi dan saling memperkuat dalam memenuhi kebutuhan statistik, serta menghindari terjadinya duplikasi kegiatan”. (UU no. 16 tahun 1997)”.

**... dan berstandar internasional...**

“Setiap penyelenggaraan kegiatan statistik, BPS akan selalu berpedoman kepada konsep, standar dan metode yang berlaku secara universal dan berstandar internasional, mengikuti kaidah yang digariskan dalam *Fundamental Principle of Official Statistics*”.

2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik;

**Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan ...**

“Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik. Sistem Statistik Nasional perlu diwujudkan secara terus menerus dan berkelanjutan. (UU no. 16 tahun 1997)”.

### **... pembinaan dan koordinasi ...**

“BPS memiliki mandat untuk melakukan pembinaan terhadap instansi lain terkait dengan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral. BPS juga memiliki mandat untuk melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah untuk membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran ukuran. (UU no. 16 tahun 1997).

Penyelenggaraan kegiatan statistik perlu didukung upaya-upaya koordinasi dan kerjasama serta upaya pembinaan terhadap seluruh komponen masyarakat statistik (PP No.51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik).

Dalam melakukan pembinaan statistik, BPS dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swasta, dan atau unsur masyarakat lainnya. Upaya pembinaan statistik yang dilakukan BPS sesuai PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, meliputi:

- a) Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan statistik;
- b) Pengembangan statistik sebagai ilmu;
- c) Peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung penyelenggaraan statistik;
- d) Perwujudan kondisi yang mendukung terbentuknya pembakuan dan pengembangan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran dalam kerangka semangat kerjasama dengan para penyelenggara kegiatan statistik lainnya;
- e) Pengembangan sistem informasi statistik;
- f) Peningkatan penyebarluasan informasi statistik;
- g) Peningkatan kemampuan penggunaan dan pemanfaatan hasil statistik untuk mendukung pembangunan nasional;
- h) Peningkatan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik.

Koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan statistik meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. Pelaksanaan kegiatan statistik;
- b. Pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran.

Koordinasi dan atau kerjasama penyelenggaraan statistik antara BPS, instansi pemerintah, dan masyarakat dilaksanakan atas dasar prinsip kemitraan. Koordinasi dan atau kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik dilakukan dalam rangka membangun satu pusat rujukan informasi statistik nasional. Koordinasi

dan atau kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik mencakup perencanaan, pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan atau analisis statistik”.

3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan

#### **Membangun insan statistik ...**

“Pembangunan insan statistik dilakukan untuk mewujudkan pengejawantahan nilai-nilai organisasi Badan Pusat Statistik, yakni profesional, berintegritas dan amanah”.

#### **... yang profesional...**

“Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, insan statistik yang harus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang diperlukan untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas”.

#### **... berintegritas ...**

“Insan statistik yang menyelenggarakan kegiatan statistik harus memiliki integritas yaitu memiliki sikap dan perilaku dalam melaksanakan profesi/tugasnya seperti dedikasi (pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban), disiplin (melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan), konsisten (satunya kata dengan perbuatan), terbuka (menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik-kritik dari berbagai pihak), dan akuntabel (bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur)”.

#### **...amanah...**

“Amanah merujuk kepada sikap yang selalu mengedepankan kejujuran di dalam melaksanakan kegiatan statistik”.

### **2.3. Tujuan**

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengamankan BPS untuk menyediakan data dan informasi statistik pada skala nasional maupun regional, serta melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan statistik.

Rumusan Tujuan BPS Provinsi DKI Jakarta untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi BPS Provinsi DKI Jakarta dapat dijelaskan melalui pemaparan bagan di bawah ini:

**Tabel. 2-2 Rumusan Visi, Misi, dan Tujuan BPS Provinsi DKI Jakarta 2015-2019**

<b>Visi BPS Provinsi DKI Jakarta 2015- 2019</b>	Pelopor data statistik terpercaya untuk semua	<b>Misi BPS Provinsi DKI Jakarta 2015-2019</b>
		1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional
		2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional (SSN) yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik
		3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan
<b>Tujuan Tahun 2019</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas</li> <li>2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik</li> <li>3. Penguatan Sistem Statistik Nasional (SSN) melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik</li> <li>4. Peningkatan birokrasi yang akuntabel</li> </ol>	

Adapun tujuan BPS Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mencapai Visi BPS Provinsi DKI Jakarta dan mewujudkan Misi BPS Provinsi DKI Jakarta untuk kurun waktu 2015 – 2019 adalah sebagai berikut.

1. Tujuan 1 : Peningkatan kualitas data statistik, terkait dengan:

1.1 Misi ke-1 : Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi,

1.2 Misi ke-3 : Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

2. Tujuan 2 : Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik, terkait dengan:

2.1 Misi ke-2 : Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik,

2.2 Misi ke-3 : Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

3. Tujuan 3 : Peningkatan penyelenggaraan/pelaksanaan birokrasi yang akuntabel, terkait dengan:

3.1 Misi ke-3 : Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

Tujuan pertama pembangunan statistik menuntut BPS untuk meningkatkan kualitas data statistik. Tujuan pertama ini akan didukung dan diupayakan dengan menerapkan program Statcap CERDAS (*Statistical Capacity Building – Change and Reform for Development of Statistics in Indonesia*) kerangka penjaminan kualitas.

Tujuan kedua berupa peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik. Keberhasilan upaya peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik tidak terlepas dari dukungan dan peranan TIK, yang diwujudkan melalui pembangunan arsitektur dan kerangka TIK dan manajemen informasi. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya penggunaan TIK statistik. Tujuan kedua ini akan diperkuat oleh komponen kedua Statcap CERDAS yaitu Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sistem Informasi Manajemen Statistik.

Tujuan ketiga Peningkatan penyelenggaraan/pelaksanaan birokrasi yang akuntabel, di dalam tujuan tersebut terkait dengan misi membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. Untuk itu, peningkatan kapasitas dan kemampuan tenaga statistik di pusat maupun daerah harus terus dilakukan. Tujuan keempat ini diperkuat dengan komponen ketiga Statcap CERDAS yaitu pengembangan sumber daya manusia.

Keberhasilan BPS Provinsi DKI Jakarta dalam hal penerapan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) diukur dengan cara melihat keberhasilan tujuan, sehingga perlu ditetapkan secara spesifik indikator dan target dari setiap tujuan BPS Provinsi DKI Jakarta.

Indikator dan target dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel. 2-3 Tujuan dan Indikator Tujuan BPS Provinsi DKI Jakarta  
2015-2019:**

No	TUJUAN		TARGET				
	URAIAN	INDIKATOR	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Peningkatan kualitas data statistik	Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	80	81	82	83	84
2	Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS Provinsi DKI Jakarta	84	84	85	85	86
3	Peningkatan penyelenggaraan/ pelaksanaan birokrasi yang akuntabel	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	60	60	65	65	70

#### **2.4. Sasaran Strategis BPS Provinsi DKI Jakarta**

Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPS Provinsi DKI Jakarta yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program BPS Provinsi DKI Jakarta. Program BPS Provinsi DKI Jakarta terdiri dari program teknis yang merupakan program-program yang menghasilkan pelayanan kepada masyarakat (pelayanan eksternal) dan program generik merupakan program-program yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung dan atau administrasi BPS (pelayanan internal). Adapun tujuan dan sasaran strategis teknis BPS dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



**Tabel. 2-4 Tujuan dan Sasaran Strategis BPS Provinsi DKI Jakarta**

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN STRATEGIS TEKNIS</b>
(1)	(2)
T1. Peningkatan kualitas data statistik	SS1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS Provinsi DKI Jakarta
	SS2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data ( <i>respondent engagement</i> )
T2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	SS3. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data ( <i>user engagement</i> )
T3. Peningkatan penyelenggaraan/ pelaksanaan birokrasi yang akuntabel	SS4. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS Provinsi DKI Jakarta
	SS5. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS Provinsi DKI Jakarta

Secara ringkas rumusan indikator pada sasaran strategis pembangunan statistic nasional Indonesia dalam rangka mencapai Visi BPS dan mewujudkan Misi BPS untuk kurun waktu 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran strategis dari tujuan pertama: “Peningkatan kualitas data statistik”.  
Adalah :
  - 1.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS Provinsi DKI Jakarta  
Dengan indikator sasaran :
    - 1.1.1. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik;
    - 1.1.2. Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS Provinsi DKI Jakarta sebagai rujukan utama;
    - 1.1.3. Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS;
    - 1.1.4. Jumlah *release* data statistik yang tepat waktu;
    - 1.1.5. Jumlah publikasi/laporan statistik yang terbit tepat waktu;

1.1.6. Jumlah publikasi/laporan sensus yang terbit tepat waktu;

1.2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (*respondent engagement*)

Dengan indikator sasaran :

1.2.1. Persentase pemasukan dokumen (*response rate*) survei dengan pendekatan rumah tangga;

1.2.2. Persentase pemasukan dokumen (*response rate*) survei dengan pendekatan usaha; dan

1.2.3. Persentase pemasukan dokumen (*response rate*) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha.

2. Sasaran strategis dari tujuan kedua: "Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik". Adalah :

2.1. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (*user engagement*)

Dengan indikator sasaran :

2.1.1. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS Provinsi DKI Jakarta,

2.1.2. Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS,

2.1.3. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS Provinsi DKI Jakarta.

3. Sasaran strategis dari tujuan ketiga: "Peningkatan penyelenggaraan/pelaksanaan birokrasi yang akuntabel" adalah :

3.1. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS Provinsi DKI Jakarta

Dengan indikator sasaran :

3.1.1. Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu; dan

3.1.2. Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I.

3.2. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

Dengan indikator sasaran :

- 1.1.1. Jumlah Laporan Dukungan Manajemen;
- 1.1.2. Persentase rekomendasi inspektorat yang telah selesai ditindaklanjuti
- 1.1.3. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat
- 1.1.4. Persentase pembayaran upah dan Gaji yang tepat waktu
- 1.1.5. Persentase Sarana Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Kondisi baik
- 1.1.6. Persentase Sarana dan Prasarana Lainnya dalam kondisi Baik
- 1.1.7. Persentase pengadaan kendaraan bermotor yang diselesaikan
- 1.1.8. Persentase Persentase pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi yang diselesaikan
- 1.1.9. Persentase pengadaan peralatan dan fasilitas yang diselesaikan
- 1.1.10. Persentase pengadaan tanah dan pengadaan, rehabilitasi, revitalisasi, dan pembangunan gedung/bangunan yang diselesaikan

## 2.5 Nilai-Nilai Inti BPS Provinsi DKI Jakarta

Nilai inti merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh setiap pegawai dan yang memandu pegawai dalam memilih berbagai alternatif yang diperlukan untuk menuju masa depan. BPS telah menetapkan nilai-nilai inti yang dapat dijadikan sebagai pedoman oleh setiap pegawainya termasuk di BPS Provinsi DKI Jakarta dalam menetapkan keputusan berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi BPS. Nilai-nilai inti BPS tersebut adalah sebagai berikut.

Nilai-nilai Inti (*core values*) Badan Pusat Statistik adalah:

- **Profesional** (Kompeten, Efektif, Efisien, Inovatif dan Sistemik),
- **Integritas** (Dedikasi, Disiplin, Konsisten, Terbuka dan Akuntabel),
- **Amanah** (Terpercaya, Jujur, Tulus dan Adil).

Nilai-nilai inti BPS ini merupakan pondasi yang kokoh untuk membangun jati diri dan penuntun perilaku setiap insan BPS dalam melaksanakan tugas. Adapun penjabaran dari nilai-nilai Inti BPS ini adalah sebagai berikut:

## 1. Profesional

Profesional merupakan modal dasar yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam melaksanakan profesi/tugasnya, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kompeten  
mempunyai keahlian dalam bidang tugas yang diemban,
- b. Efektif  
memberikan hasil maksimal,
- c. Efisien  
mengerjakan setiap tugas secara produktif, dengan sumber daya minimal,
- d. Inovatif  
selalu melakukan pembaruan dan atau penyempurnaan melalui proses pembelajaran diri secara terus-menerus,
- e. Sistemik  
meyakini bahwa setiap pekerjaan mempunyai tata urutan proses sehingga pekerjaan yang satu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pekerjaan yang lain.

## 2. Integritas

Integritas merupakan sikap dan perilaku kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam pengabdian kepada organisasi, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Dedikasi  
memiliki pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban dan institusi,
- b. Disiplin  
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan,
- c. Konsisten  
selarasnya kata dengan perbuatan,
- d. Terbuka  
menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik dari berbagai pihak,
- e. Akuntabel  
bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur.

### **3. Amanah**

Amanah merupakan sikap kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai untuk dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

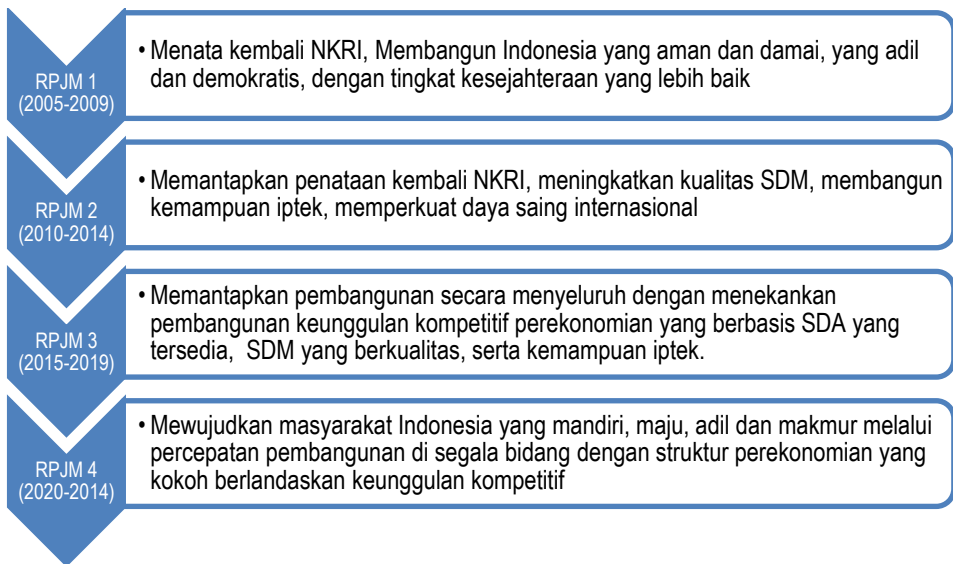
- a. Terpercaya  
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, yang tidak hanya didasarkan pada logika tetapi juga sekaligus menyentuh dimensi mental spiritual,
- b. Jujur  
melaksanakan semua pekerjaan dengan tidak menyimpang dari prinsip moralitas,
- c. Tulus  
melaksanakan tugas tanpa pamrih, menghindari konflik kepentingan (pribadi, kelompok, dan golongan), serta mendedikasikan semua tugas untuk perlindungan kehidupan manusia, sebagai amal ibadah atau perbuatan untuk Tuhan Yang Maha Esa,
- d. Adil  
menempatkan sesuatu secara berkeadilan dan memberikan haknya.

**BAB 3**  
**ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

**3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional**

**3.1.1 Agenda Prioritas**

Dalam kerangka pencapaian visi jangka panjang, yakni Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, RPJPN 2005-2025 mengamanatkan bahwa RPJMN ke-3 periode 2015-2019 diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan iptek.



**RPJP 2005-2025**

**Gambar 3-1 Tahapan RPJPN 2005-2025**

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian

dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWACITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Nawacita pemerintahan tersebut memiliki hubungan yang erat dengan pembangunan statistik yang dilakukan oleh BPS, antara lain:

1. Nawacita kesatu - Menghadirkan kembali negara untuk melindungi bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga. Dukungan BPS untuk agenda prioritas ini dengan menyediakan data yang terkait dengan nilai kebangsaan dan keamanan.
2. Nawacita kedua – Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Untuk maksud tersebut, BPS telah melaksanakan reformasi birokrasi dimulai dengan persiapan transformasi melalui program Statistical Capacity Building – Change and Reform for Development of Statistics (Statcap CERDAS) sejak tahun 2008.
3. Nawacita ketiga – Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. BPS mendukung agenda prioritas ini melalui penyediaan data spasial yang dilaksanakan secara berkala.
4. Nawacita keempat - Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. BPS menerapkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan

Wilayah Bersih, Bebas dan Melayani (WBBM), Strategi Nasional Program Pencegahan Korupsi (Stranas PPK), penerapan zona integritas.

5. Nawacita kelima – Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. BPS mendukung agenda prioritas dalam menyediakan data yang terkait statistik kesejahteraan rakyat seperti data konsumsi, ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.
6. Nawacita keenam - Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa Asia lainnya. BPS mendukung agenda prioritas dalam menyediakan data yang terkait statistik produksi dan distribusi seperti data pertanian, industri, ekspor-impor, dan lain sebagainya.
7. Nawacita ketujuh – Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, BPS mendukung agenda prioritas dalam menyediakan data ekonomi makro seperti Produk Domestik Bruto (PDB), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi, dan lain sebagainya.
8. Nawacita kesembilan – Memperteguh ke-bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia, BPS mendukung agenda prioritas melalui penyediaan data ketahanan sosial, seperti statistik modal sosial, nilai kebangsaan, indeks demokrasi indonesia, dan lain sebagainya.

### **3.1.2. Quickwins dan Program Lanjutan**

*Quickwins* dan program lanjutan merupakan bentuk akselerasi program yang telah diselaraskan dengan sembilan agenda prioritas pemerintah (Nawacita) dan Trisakti ke dalam bentuk kegiatan prioritas. Selanjutnya beberapa prioritas pembangunan nasional tersebut diharapkan dapat memberikan landasan yang baik bagi pelaksanaan program dan kegiatan nasional dalam RPJMN 2015-2019. Sehingga sasaran-sasaran pembangunan dapat tercapai dan dapat meningkatkan kesejahteraan serta bermanfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

*Quickwins* BPS adalah metode pengukuran data kemiskinan yang disempurnakan. *Quickwins* BPS digunakan untuk mendukung *quickwins* nasional yaitu penyempurnaan data kemiskinan dengan sasaran jumlah penduduk miskin menjadi 10,25% dari 11,25%.

Sedangkan program lanjutan untuk BPS ada pada kegiatan Publikasi Indeks kesetaraan dan Keadilan Gender per kabupaten sebagai basis insentif dan disinsentif Alokasi Dana Desa. Sasaran kegiatan ini adalah menguatnya peran lembaga yang memberikan perspektif gender dengan indikator jumlah



publikasi/laporan Indeks Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender per kabupaten yang terbit tepat waktu.

### 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi BPS

Data statistik yang berkualitas sangat diperlukan oleh semua pihak sebagai bahan rujukan untuk menyusun perencanaan, melakukan evaluasi, membuat keputusan, dan memformulasikan kebijakan agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Data statistik seringkali juga dimanfaatkan sebagai alat konfirmasi dan legitimasi terhadap penilaian program pembangunan pemerintah.

Tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam dan berkualitas semakin hari semakin meningkat. Pengguna data senantiasa menginginkan ketersediaan data dengan lebih cepat (*faster*), lebih mudah diperoleh (*easier*), dan lebih berkualitas (*better*). Upaya pengembangan yang dilakukan sampai saat ini telah menghasilkan beragam data dan indikator-indikator sosial-ekonomi.

### 3.3. Arah Kebijakan dan Strategi BPS Provinsi DKI Jakarta

Seiring dengan arah kebijakan dan strategi BPS RI, BPS Provinsi DKI Jakarta berupaya melakukan pengembangan untuk mewujudkan visi dan misi BPS antara lain INFOSTAT, yaitu publikasi ringkas statistik dalam *leaflet*. Publikasi ini sangat praktis, dan *stakeholders* dapat memperolehnya melalui *email*. Meskipun demikian, data yang dihasilkan tidak jarang mendapatkan kritik karena dinilai tidak mencerminkan realitas di lapangan. Pro dan kontra mengenai data yang dihasilkan mengindikasikan bahwa kualitas data yang tersedia masih perlu ditingkatkan. Melalui forum “**Dialog Data Djakarta**” yang dilaksanakan pada waktu tertentu, diharapkan permasalahan tersebut dapat diselesaikan.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, serta mengacu pada Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 dan Rencana Strategis BPS, maka BPS Provinsi DKI Jakarta menetapkan arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategisnya.

**Tabel.3-1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, dan Strategi**

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>STRATEGI</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
T1. Peningkatan kualitas data statistik	SS1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS Provinsi DKI Jakarta	1. Peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan publikasi survei yang mencantumkan ukuran kualitas,</li> <li>2. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk pengumpulan serta pengolahan data dan informasi statistik,</li> <li>3. Meningkatkan kualitas metodologi survei dan sensus sesuai standar internasional</li> </ol>
	SS2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement)	1. Peningkatan response rate	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan komunikasi dengan penyedia data,</li> <li>2. Meningkatkan sosialisasi kegiatan BPS.</li> </ol>
T2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	SS3. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement)	1. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyebaran data dan informasi statistik kepada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan diseminasi hasil kegiatan statistik,</li> <li>2. Meningkatkan Customer Relationship Management,</li> <li>3. Meningkatkan sosialisasi kegiatan statistik.</li> </ol>
T3. Peningkatan penyelenggaraan/ pelaksanaan birokrasi yang akuntabel	SS4. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS Provinsi DKI Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan fungsi yang terkait dengan sistem manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja</li> <li>2. Penyelarasan kegiatan yang terkait dengan reformasi birokrasi BPS khususnya yang terkait dengan system manajemen SDM aparatur,</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan pembangunan keseluruhan sistem manajemen SDM aparatur yang terintegrasi dan komprehensif,</li> <li>2. Mengoptimalkan pengembangan kompetensi SDM aparatur, termasuk Meningkatkan kompetensi SDM dalam bidang teknis statistik dan TI, pemenuhan sarana dan prasarana BPS</li> </ol>

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
(1)	(2)	(3)	(4)
		pengawasan, akuntabilitas kinerja	yang mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik, 3. Mengoptimalkan penyiapan kebutuhan insan statistik (tenaga statistisi dan pranata komputer) yang baru.
	SS5. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS Provinsi DKI Jakarta		1. Mengoptimalkan pengawasan penggunaan anggaran dalam rangka meminimalkan penyimpangan penggunaan anggaran, 2. Meningkatkan kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS.

### **3.3.1. Arah Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Statistik**

Arah kebijakan pembangunan nasional (RPJMN 2015 – 2019) yang terkait dengan pembangunan statistik, merupakan dasar pertimbangan BPS dalam menetapkan kerangka pikir dan arah kebijakan pembangunan statistik tahun 2015 - 2019. Sedangkan BPS Provinsi DKI Jakarta mengikuti arah kebijakan pembangunan statistik BPS Tahun 2015-2019.

Keinginan masyarakat terhadap data berkualitas, mengisyaratkan bahwa pemerintah harus mampu menyajikan data dan informasi statistik yang dapat dipercaya, relevan, dan tepat waktu melalui proses kerja yang sistematis tanpa ada distorsi, melalui penataan organisasi serta tata laksana penyediaan data dan informasi, dan didukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang modern. Untuk meningkatkan tata laksana penyediaan data dan informasi, dibutuhkan upaya yang luar biasa agar dapat mencapai kinerja yang optimal. Peningkatan tersebut bukan berarti bahwa pembangunan statistik hanya difokuskan pada peningkatan teknik statistik semata, namun perbaikan proses manajemen untuk menghasilkan data tersebut juga harus menjadi perhatian.

Guna memenuhi kebutuhan data dan informasi statistik tersebut, sampai dengan tahun 2014 telah dipublikasikan beberapa indikator ekonomi dan sosial. Indikator ekonomi tersebut mencakup Produk Domestik Bruto, Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi (Indeks Harga Konsumen), Ekspor dan Impor, Nilai Tukar Petani, Industri, Pertambangan, Keuangan Daerah, dan berbagai indeks harga lainnya. Sedangkan indikator-indikator sosial dihasilkan melalui survei dan sensus kependudukan, ketenagakerjaan, kemiskinan, potensi desa, dan sejenisnya. Semua indikator ekonomi dan sosial tersebut telah dapat dihasilkan secara reguler maupun dalam waktu tertentu.

### **3.3.2 Program dan Kegiatan**

Dalam pelaksanaan kegiatan statistik, penyusunan program dan kegiatan dalam Renstrada BPS Provinsi DKI Jakarta 2015-2019 mengacu pada sasaran strategis yang telah ditetapkan. BPS mempunyai satu Program Teknis dan tiga Program Generik. Program Teknis BPS adalah Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik. Adapun Program Generik BPS meliputi: (i) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS, (ii) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS, (iii) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS.

Setiap program dijabarkan menjadi kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing unit Eselon II. Program Teknis BPS Provinsi adalah Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik yang merupakan dekonsentrasi kegiatan dari masing-masing Eselon II di BPS (pusat). Sedangkan untuk Program Generik, pada setiap Satuan Kerja Eselon II BPS Provinsi disediakan dua program, yaitu: (i) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi, dan (ii) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS Provinsi.

Demikian pula bagi BPS Kabupaten/Kota disediakan Program Teknis dan Program Generik yang sama dengan BPS Provinsi.

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik bertujuan untuk menyediakan dan memberikan pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data. Untuk menyediakan data dan informasi statistik tersebut, BPS Provinsi DKI Jakarta secara berkesinambungan menyempurnakan dan mengembangkan kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengkajian dan analisis, serta diseminasi data dan informasi statistik.

Kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam Program PPIS dapat dilaksanakan secara optimal jika didukung oleh 2 (dua) program generik yaitu: Program DMPTTL dan Program PSPA.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Dasar kebijaksanaan dalam rencana anggaran program ini diarahkan untuk kegiatan-kegiatan operasional penyelenggaraan lembaga seperti perencanaan program dan kegiatan, pemantauan dan evaluasi kegiatan, penyediaan gaji pegawai, peningkatan kapasitas SDM, dan fungsi kehumasan di BPS Provinsi DKI Jakarta.

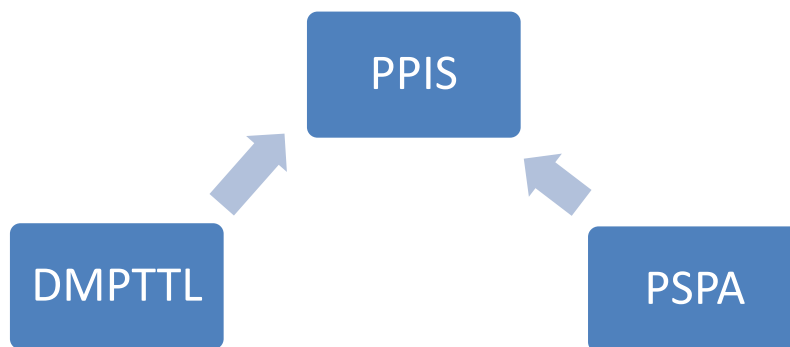
Sedangkan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS Provinsi bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada di BPS Provinsi DKI Jakarta, antara lain kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja, serta penyediaan rumah dinas dan sarana transportasi.

Prioritas kegiatan BPS dilaksanakan dengan didasarkan kepada:

- a. UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
- b. Penyediaan data strategis yang mendukung Visi dan Misi RPJM Nasional.

Penyelenggaraan Sensus Pertanian 2013, Sensus Ekonomi 2016, dan Sensus Penduduk 2020 telah ditetapkan sebagai Isu Strategis. Sedangkan kegiatan survei BPS lainnya tetap merupakan prioritas Kementerian/Lembaga.

Adapun hubungan antar program BPS dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis BPS, adalah sebagai berikut.



Gambar 3-2 Hubungan antara program teknis (PPIS) dengan program generik (DMPTTL dan PSPA)

Berikut ini dipaparkan rekapitulasi program dan kegiatan BPS Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis BPS Provinsi DKI Jakarta, baik yang bersifat teknis maupun generik dalam kurun waktu 2015 – 2019.

Tabel.3-2 Program dan Kegiatan BPS Provinsi DKI Jakarta

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
T1. Peningkatan kualitas data statistik	SS1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS Provinsi DKI Jakarta	1. Peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan publikasi survei yang mencantumkan ukuran kualitas,</li> <li>2. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk pengumpulan serta pengolahan data dan informasi statistik,</li> <li>3. Meningkatkan kualitas metodologi survei dan sensus sesuai standar internasional</li> </ol>	Program PPIS	Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi
	SS2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement)	1. Peningkatan response rate	1. Meningkatkan komunikasi dengan penyedia data,	Program PPIS	Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi
			2. Meningkatkan sosialisasi kegiatan BPS.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program PPIS</li> <li>• Program DMPTTL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi</li> <li>• Dukungan Manajemen dalam Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi</li> </ul>

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
T2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	SS3. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement)	1. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyebaran data dan informasi statistik kepada masyarakat	1. Meningkatkan diseminasi hasil kegiatan statistik, 2. Meningkatkan <i>Customer Relationship Management</i> ,	Program PPIS	Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi
			3. Meningkatkan sosialisasi kegiatan statistik.	Program DMPTTL	Dukungan Manajemen dalam Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi
T3. Peningkatan penyelenggaraan/ pelaksanaan birokrasi yang akuntabel	SS4. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS Provinsi DKI Jakarta	1. Penguatan fungsi yang terkait dengan sistem manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja 2. Penyelarasan kegiatan yang terkait dengan reformasi birokrasi BPS khususnya yang terkait dengan system manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja	1. Mengoptimalkan pembangunan keseluruhan sistem manajemen SDM aparatur yang terintegrasi dan komprehensif, 2. Mengoptimalkan pengembangan kompetensi SDM aparatur, termasuk Meningkatkan kompetensi SDM dalam bidang teknis statistik dan TI, pemenuhan sarana dan prasarana BPS yang mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik, 3. Mengoptimalkan penyiapan kebutuhan insan statistik (tenaga statistisi dan pranata komputer) yang baru.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program DMPTTL</li> <li>• Program PSPA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukungan Manajemen dalam Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi</li> <li>• Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS Provinsi</li> </ul>

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	SS5. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS Provinsi DKI Jakarta		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan pengawasan penggunaan anggaran dalam rangka meminimalkan penyimpangan penggunaan anggaran,</li> <li>2. Meningkatkan kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS.</li> </ol>	Program DMPTTL	Dukungan Manajemen dalam Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi



Berdasarkan hasil pemetaan tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi BPS Provinsi DKI Jakarta, maka dapat diinventarisasi kebutuhan program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran strategis 2015 – 2019, yaitu sebagai berikut:

1. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS), dengan Kegiatan yaitu Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi.
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMP TTL), dengan kegiatan yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA), dengan kegiatan yaitu Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi.

## **BAB 4**

### **TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

#### **4.1. Target Kinerja**

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis K/L 2015-2019 bahwa target kinerja merupakan hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja. Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Renstrada BPS Provinsi DKI Jakarta 2015 – 2019 diukur dengan berbagai indikator kinerja beserta target kinerjanya. Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, baik indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan.

##### **4.1.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis**

Indikator Sasaran Strategis BPS Provinsi DKI Jakarta untuk Pembangunan Jangka Menengah periode 2015 – 2019 merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis BPS Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu tersebut.

Adapun Indikator Sasaran Strategis BPS Provinsi DKI Jakarta 2015 – 2019 disertai target kinerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel. 4-1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET KINERJA 2019
(1)	(2)	(3)	(4)
T1. Peningkatan kualitas data statistik	SS1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS Provinsi DKI Jakarta	IKSS 1.1. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	80
		IKSS 1.2. Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS Provinsi DKI Jakarta sebagai rujukan utama	62
		IKSS 1.3. Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	100
		IKSS 1.4. Jumlah release data statistik yang tepat waktu	28
		IKSS 1.5. Jumlah publikasi/laporan statistik yang terbit tepat waktu	25
		IKSS 1.6. Jumlah publikasi/laporan sensus yang terbit tepat waktu;	1
	SS2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data ( <i>respondent engagement</i> )	IKSS 2.1. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga	98
		IKSS 2.2. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha	98
		IKSS 2.3. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha	100
	T2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	SS3. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data ( <i>user engagement</i> )	IKSS 3.1. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS Provinsi DKI Jakarta

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET KINERJA 2019
(1)	(2)	(3)	(4)
		IKSS 3.2. Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS Provinsi DKI Jakarta	74
		IKSS 3.3. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS Provinsi DKI Jakarta	75
T3. Peningkatan penyelenggaraan/ pelaksanaan birokrasi yang akuntabel	SS4. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS Provinsi DKI Jakarta	IKSS 4.1. Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu	45
		IKSS 4.2. Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I	81
	SS5. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS Provinsi DKI Jakarta	IKSS 5.1. Jumlah Laporan Dukungan Manajemen	15
		IKSS 5.2. Persentase rekomendasi inspektorat yang telah selesai ditindaklanjuti	100
		IKSS 5.3. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	70
		IKSS 5.4. Persentase pembayaran upah dan Gaji yang tepat waktu	100
		IKSS 5.5. Persentase Sarana Prasaran Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Kondisi baik	95
		IKSS 5.6. Persentase Sarana dan Prasarana Lainnya dalam kondisi Baik	95
IKSS 5.7. Persentase pengadaan kendaraan bermotor yang diselesaikan	100		

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS</b>	<b>TARGET KINERJA 2019</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
		IKSS 5.8. Persentase Persentase pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi yang diselesaikan	100
		IKSS 5.9. Persentase pengadaan peralatan dan fasilitas yang diselesaikan	100
		IKSS 5.10. Persentase pengadaan tanah dan pengadaan, rehabilitasi, revitalisasi, dan pembangunan gedung/bangunan yang diselesaikan	100

#### 4.1.2 Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka dalam kurun waktu 2015 – 2019, BPS Provinsi DKI Jakarta akan menjalankan 1 (satu) program teknis dan 2 (dua) program generik. Adapun ketiga program yang akan dijalankan oleh BPS Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS), dengan Kegiatan yaitu Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi.
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL), dengan kegiatan yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA), dengan kegiatan yaitu Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi.

Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan keempat program disertai masing-masing kegiatan ini perlu ditetapkan dengan indikator kinerja program (IKP) dan indicator kinerja kegiatan (IKK). Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator Kinerja Program ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Sedangkan Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*).

Indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan dari masing-masing program dan kegiatan BPS Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu 2015 – 2019 dapat dilihat pada Lampiran 1.

#### 4.2. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai sasaran strategis BPS Provinsi DKI Jakarta. Adapun kerangka pendanaan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan BPS Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut.

**Tabel. 4-3 Matriks Pendanaan**

PROGRAM	KEGIATAN	ALOKASI PENDANAAN (dalam Rupiah)				
		2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Program DMPTTL	Dukungan Manajemen dalam Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi	10.511.623.000	11.562.785.000	12.719.063.000	13.990.970.000	15.390.067.000
Program PSPA	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS Provinsi	718.100.000	789.910.000	868.901.000	955.791.000	1.051.370.000
Program PPIS	Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi	8.304.134.000	9.134.547.000	10.048.002.000	11.052.802.000	12.158.082.000
<b>TOTAL</b>		<b>19.533.857.000</b>	<b>21.487.242.000</b>	<b>23.635.966.000</b>	<b>25.999.563.000</b>	<b>28.599.519.000</b>

## **BAB 5 PENUTUP**

Renstrada BPS Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 – 2019 disusun mengacu pada Renstra BPS Tahun 2015 – 2019 dan arah kebijakan pembangunan nasional RPJMN 2015 – 2019 yang membutuhkan ketersediaan data statistik berkualitas, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional. Produk dari BPS tersebut dihasilkan oleh suatu proses dengan akuntabilitas yang jelas. Dengan demikian, pengembangan Renstrada BPS Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 - 2019 berfokus pada peningkatan kualitas dari bisnis inti (*core business*) BPS, yakni:

1. Penyediaan data statistik berkualitas;
2. Pelayanan prima hasil kegiatan statistik; dan
3. Pembinaan dan koordinasi dalam kerangka Sistem Statistik Nasional.

Dengan tujuan strategis BPS Provinsi DKI Jakarta untuk periode 2015 – 2019, yakni:

1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas;
2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik;
3. Peningkatan koordinasi kegiatan statistik dalam rangka penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) yang bersinambung; dan
4. Peningkatan birokrasi yang akuntabel.

Dalam Renstrada BPS Provinsi DKI Jakarta 2015 – 2019, setiap tujuan strategis memiliki sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis, arah kebijakan serta program dan kegiatan. Keberhasilan masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja yang dipantau dan dievaluasi dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja. Pelaksanaan pembangunan statistik dilakukan secara menyeluruh oleh BPS melalui upaya mentransformasi seluruh kegiatan statistik dalam program *Statistical Capacity Building-Chane and Reform for Development of Statistics in Indonesia* (Statcap CERDAS).

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Renstrada BPS Provinsi DKI Jakarta 2015-2019 membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran BPS Provinsi DKI Jakarta serta BPS Kabupaten/Kota di DKI Jakarta. Keinginan kuat untuk melakukan perubahan yang bersifat strategis di level BPS merupakan bentuk nyata dari komitmen yang tinggi tersebut. Seluruh insan statistik BPS Provinsi DKI Jakarta menyadari bahwa mereka memiliki komitmen yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan, serta memiliki budaya untuk menghasilkan kinerja tinggi sebagaimana yang tercermin dalam nilai-nilai organisasi BPS Provinsi DKI Jakarta, yakni profesional, berintegritas, dan amanah. Dengan modal ini, BPS Provinsi DKI Jakarta optimis bahwa seluruh target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Renstrada BPS Provinsi DKI Jakarta 2015-2019 ini dapat diraih dan akan memberikan dampak kepada kesuksesan seluruh program pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya untuk memandu bakti BPS Provinsi DKI Jakarta kepada nusa dan bangsa.



# LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 - Matriks Kinerja dan Pendanaan

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam ribu rupiah)					BIDANG/BAGIA N PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>BPS PROVINSI DKI JAKARTA</b>							19.533.857	21.487.242	23.635.966	25.999.563	28.599.519	119.265.147
	<b>SS.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS Provinsi DKI Jakarta</b>											1. Bidang Statistik Sosial 2. Bidang Statistik Produksi 3. Bidang Statistik Distribusi 4. Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik 5. Bidang IPDS 6. Bagian Tata Usaha
	1.1. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	80	81	82	83	84						
	1.2. Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS Provinsi DKI Jakarta sebagai rujukan utama	50	53	56	59	62						
	1.3. Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	100	100	100	100	100						
	1.4. Jumlah release data statistik yang tepat waktu	27	28	28	28	28						
	1.5. Jumlah publikasi/laporan statistik yang terbit tepat waktu	23	26	27	26	25						
	1.6. Jumlah publikasi/laporan sensus yang terbit tepat waktu	6	1	1	1	1						
	<b>SS.2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement)</b>											
	2.1. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga	96	98	98	98	98						
	2.2. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha	95	97	97	98	98						
	2.3. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha	100	100	100	100	100						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam ribu rupiah)					BIDANG/BAGIAN PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	<b>SS.3. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement)</b>											
	3.1. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS Provinsi DKI Jakarta	72.000	73.000	74.000	75.000	76.000						
	3.2. Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS Provinsi DKI Jakarta	70	71	72	73	74						
	3.3. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS Provinsi DKI Jakarta	65	67	69	72	75						
	<b>SS.4. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS Provinsi DKI Jakarta</b>											
	4.1. Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu	35	37	40	43	45						
	4.2. Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I	70	73	75	78	81						
	<b>SS.5. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS Provinsi DKI Jakarta</b>											
	5.1. Jumlah Laporan Dukungan Manajemen	15	15	15	15	15						
	5.2. Persentase rekomendasi inspektorat yang telah selesai ditindaklanjuti	100	100	100	100	100						
	5.3. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	60	60	65	65	70						
	5.4. Persentase pembayaran upah dan Gaji yang tepat waktu	100	100	100	100	100						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam ribu rupiah)					BIDANG/BAGIA N PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	5.5. Persentase Sarana Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Kondisi baik	95	95	95	95	95						
	5.6. Persentase Sarana dan Prasarana Lainnya dalam kondisi Baik	95	95	95	95	95						
	5.7. Persentase pengadaan kendaraan bermotor yang diselesaikan	100	100	100	100	100						
	5.8. Persentase Persentase pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi yang diselesaikan	100	100	100	100	100						
	5.9. Persentase pengadaan peralatan dan fasilitas yang diselesaikan	100	100	100	100	100						
	5.10. Persentase pengadaan tanah dan pengadaan, rehabilitasi, revitalisasi, dan pembangunan gedung/bangunan yang diselesaikan		100	100	100	100						
<b>Kegiatan 2895 - Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi</b>							8.304.134	9.134.547	10.048.002	11.052.802	12.158.082	50.697.567
	<b>Laporan Pengembangan Metodologi Sensus dan survei</b>											1. Bidang Statistik Sosial
	Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	100	100	100	100	100						2. Bidang Statistik Produksi
	Jumlah Peta desa dan blok sensus yang diupdate	4.789	4.789	4.789	4.789	4.789						3. Bidang Statistik Distribusi
	<b>Laporan Diseminasi Statistik</b>	1	1	1	1	1						4. Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
	Jumlah Laporan Diseminasi Statistik yang terbit tepat waktu	1	1	1	1	1						5. Bidang IPDS
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei kebutuhan data	68	70	72	74	76						
	<b>Publikasi/Laporan Kependudukan dan Ketenagakerjaan</b>	1	1	1	2	2						
	Jumlah Publikasi/Laporan Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang terbit tepat waktu	1	1	1	2	2						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam ribu rupiah)					BIDANG/BAGIAN PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Jumlah Publikasi/Laporan Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang memiliki ISSN/ISBN	1	1	1	1	1						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei ketenagakerjaan dan kependudukan dengan pendekatan rumah tangga	97	97	97	97	97						
	<b>publikasi/laporan Sensus Penduduk</b>	-	-	-	1	1						
	Jumlah publikasi/laporan Sensus Penduduk yang terbit tepat waktu	-	-	-	1	1						
	<b>publikasi/laporan Survey Penduduk Antar Sensus</b>	97	-	-	-	-						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Penduduk Antar Sensus	97	-	-	-	-						
	<b>Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat</b>	1	1	1	1	1						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang terbit tepat waktu	1	1	1	1	1						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang memiliki ISSN/ISBN	1	1	1	1	1						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Kesejahteraan Rakyat dengan pendekatan rumah tangga	96	96	96	96	96						
	<b>Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial</b>	2	1	1	2	1						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang terbit tepat waktu	2	1	1	2	1						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang memiliki ISSN/ISBN	2	1	1	1	1						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Ketahanan Sosial dengan pendekatan rumah tangga	97	97	97	97	97						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam ribu rupiah)					BIDANG/BAGIAN PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Persentase memasukan dokumen (response rate) Survei Ketahanan Sosial dengan pendekatan non rumah tangga non usaha	100	-	-	-	-						
	<b>Jumlah Publikasi/Laporan Pendataan Potensi Desa yang tepat waktu</b>	1	-	-	1	-						
	<b>Basis data Terpadu Program Perlindungan Sosial</b>	1	-	-	-	-						
	Persentase Basis data Terpadu Program Perlindungan Sosial yang selesai tepat waktu	100	-	-	-	-						
	<b>Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan</b>	7	4	4	4	4						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang terbit tepat waktu	7	4	4	4	4						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang memiliki ISSN/ISBN	2	4	4	4	4						
	Persentase memasukan dokumen (response rate) Survei Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dengan pendekatan rumah tangga	100	100	100	100	100						
	Persentase memasukan dokumen (response rate) Survei Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dengan pendekatan usaha	96	96	98	100	100						
	Persentase memasukan dokumen (response rate) Survei Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dengan pendekatan non rumah tangga non usaha	100	100	100	100	100						
	<b>Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan</b>	1	2	2	2	2						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang terbit tepat waktu	1	2	2	2	2						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam ribu rupiah)					BIDANG/BAGIAN PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang memiliki ISSN/ISBN	1	1	1	1	1						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan dengan pendekatan rumah tangga	100	100	100	100	100						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan dengan pendekatan usaha	96	96	98	100	100						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Survei Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan dengan pendekatan non rumah tangga non usaha	100	100	100	100	100						
	<b>Publikasi/Laporan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi</b>	5	3	3	3	3						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi yang terbit tepat waktu	5	5	5	5	5						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi yang memiliki ISSN/ISBN	5	5	5	5	5						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi dengan pendekatan usaha	89	90	90	90	90						
	<b>Publikasi/Laporan Statistik Distribusi</b>	2	2	2	1	1						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Distribusi yang terbit tepat waktu	1	1	1	1	1						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Distribusi yang memiliki ISSN/ISBN	1	1	1	1	1						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam ribu rupiah)					BIDANG/BAGIA N PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei statistik distribusi dengan pendekatan usaha	97	97	97	97	97						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei statistik distribusi dengan pendekatan non rumah tangga non usaha	100	100	100	100	100						
	<b>publikasi/laporan Sensus Ekonomi 2016</b>	1	1	1	-	-						
	Jumlah publikasi/laporan Sensus Ekonomi 2016 yang terbit tepat waktu	1	1	1	-	-						
	<b>Publikasi/Laporan Statistik Harga</b>	3	3	3	3	3						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Harga yang terbit tepat waktu	3	3	3	3	3						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Harga yang memiliki ISSN/ISBN	3	3	3	3	3						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei statistik harga dengan pendekatan rumah tangga	100	100	100	100	100						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei statistik harga dengan pendekatan usaha	97	97	97	97	97						
	<b>Publikasi/Laporan Survei Harga Biaya Hidup</b>	-	1	1	-	-						
	Jumlah Publikasi/Laporan Survei Harga Biaya Hidup yang terbit tepat waktu	-	1	1	-	-						
	<b>Publikasi/Laporan Survei Penyempurnaan Diagram Timbang (2017=100)</b>	-	-	1	-	-						
	Jumlah Publikasi/Laporan Survey Penyempurnaan Diagram Timbang (2017=100) yang terbit tepat waktu	-	-	1	-	-						
	<b>Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata</b>	1	1	1	1	1						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata yang terbit	1	1	1	1	1						



PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam ribu rupiah)					BIDANG/BAGIAN PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	tepat waktu											
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata yang memiliki ISSN/ISBN	2	2	2	2	2						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata dengan pendekatan usaha	97	100	100	100	100						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei statistik survei statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata dengan pendekatan non rumah tangga non usaha	100	100	100	100	100						
	<b>Publikasi/Laporan Neraca Produksi</b>	2	2	2	2	2						
	Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Produksi yang terbit tepat waktu	2	2	2	2	2						
	Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Produksi yang memiliki ISSN/ISBN	2	2	2	2	2						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei neraca produksi dengan pendekatan usaha	100	100	100	100	100						
	<b>Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran</b>	1	2	2	2	2						
	Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran yang terbit tepat waktu	1	1	1	1	1						
	Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran yang memiliki ISSN/ISBN	1	1	1	1	1						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei neraca pengeluaran dengan pendekatan rumah tangga	100	100	100	100	100						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei neraca pengeluaran dengan pendekatan usaha	100	100	100	100	100						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei neraca pengeluaran dengan pendekatan non	100	100	100	100	100						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam ribu rupiah)					BIDANG/BAGIA N PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	rumah tangga non usaha											
	<b>Publikasi/Laporan analisis dan pengembangan statistik</b>	2	3	3	3	3						
	Jumlah Publikasi/Laporan analisis dan pengembangan statistik yang tebit tepat waktu	2	2	2	2	2						
	Jumlah Publikasi/Laporan Analisis dan Pengembangan Statistik yang memiliki ISSN/ISBN	2	2	2	2	2						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei analisis dan pengembangan statistik dengan pendekatan rumah tangga	85	100	100	100	100						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei analisis dan pengembangan statistik dengan pendekatan usaha	100	100	100	100	100						
	<b>Kegiatan 2886 : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi</b>						10.511.623	11.562.785	12.719.063	13.990.970	15.390.067	64.174.508
	<b>Layanan Perkantoran</b>											
	Jumlah Laporan Dukungan Manajemen	15	15	15	15	15						Bagian Tata Usaha
	Persentase pembayaran upah dan Gaji yang tepat waktu	100	100	100	100	100						
	Persentase Sarana Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Kondisi baik	95	95	95	95	95						
	Persentase Sarana dan Prasarana Lainnya dalam kondisi Baik	95	95	95	95	95						
	<b>Kegiatan 2891 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi</b>						718.100	789.910	868.901	955.791	1.051.370	4.384.072
	Persentase pengadaan kendaraan bermotor yang diselesaikan	100	100	100	100	100						Bagian Tata Usaha
	Persentase pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi yang diselesaikan	100	100	100	100	100						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN (dalam ribu rupiah)					BIDANG/BAGIA N PELAKSANA
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Persentase pengadaan peralatan dan fasilitas yang diselesaikan	100	100	100	100	100						
	Persentase pengadaan tanah dan pengadaan, rehabilitasi, revitalisasi, dan pembangunan gedung/bangunan yang diselesaikan	-	100	100	100	100						